

FH UMY Siap Bantu Warga Miskin

BANTUL, TRIBUN - Tiga Pusat Studi dan Kajian Hukum yang baru, dibentuk oleh Pusat Kajian Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tahun 2015 ini. Pusat Studi dan Kajian Hukum tersebut adalah Pusat Studi dan Kajian Hukum Perempuan dan Anak, Pusat Studi dan Kajian Hukum Kesehatan, dan Pusat Studi dan Kajian Hukum Perbankan Syariah.

Ketiganya didirikan dengan tujuan membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah yang memiliki literasi hukum minim. Sosialisasi dan pendampingan hukum siap diberikan masing-masing legal dari tiap Pusat Studi dan Kajian Hukum tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal itu dijelaskan Dr Trisno Raharjo SH MHum, selaku Direktur PKBH FH UMY, di Ruang Sidang FH, Senin (21/12).

"Tiga pusat studi yang kami kembangkan tersebut sesuai dengan amanah perserikatan dan juga berdasarkan hasil kajian kami. Awalnya hanya dua, yakni perbankan dan kesehatan. Namun pada akhirnya kami menambahkan perempuan dan

anak karena itu juga masuk dalam prioritas kami," terang Trisno kepada *Tribun Jogja*.

Trisno menerangkan jika perbankan diperlukan karena FH di UMY memiliki wawasan syariah. beberapa dosen yang memiliki konsentrasi di bidang tersebut diharapkan bisa mendorong dan membantu advokasi masalah perbankan dari sisi hukum. Selain itu, pihak PKBH FH UMY juga ingin menjadikan masyarakat tidak hanya sekadar kenal produk syariah, namun juga memahami aspeknya.

"Kalau kesehatan, kami memiliki Prodi Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Keperawatan. Kami melihat jika FH bisa bersinergi di sana. Muhammadiyah juga punya perserikatan Rumah Sakit sehingga perlu bagi kami untuk bersinergi. Masalah kesehatan ini masalah primer yang masyarakat akan membutuhkannya," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Dekan FH UMY tersebut.

Penambahan untuk Perempuan dan Anak berdasarkan rekomendasi dari Nasyiyatul Asyiyah yang juga disepakati oleh Dekan FH UMY se-Indonesia. "Kami telah sepakat dan setuju bahwa masalah perempuan dan anak menjadi prioritas walaupun

sudah ada perundang-undangan yang mentaunt itu, tapi nyatanya kami masih perlu masuk ke ranah tersebut," imbuh Ketua Dekan FH UMY se-Indonesia tersebut

Datang ke kantor

Sementara itu, warga kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum, bisa langsung menuju ke Kantor PKBH FH UMY di Jalan KH Ahmad Dahlan No 107 dengan membawa kartu tidak mampu. Perkara yang sudah dan tengah ditangani PKBH FH UMY adalah mereka yang sudah menghadapi persidangan dan juga konsultasi hukum.

"Secara prinsip, kami adalah Lembaga Hukum yang terakreditasi BPHN yang dipantau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kami memiliki dana untuk 15 perkara per tahun. Jadi silahkan masyarakat yang memiliki kartu tidak mampu untuk datang ke kantor PKBH, nanti kita tangani apapun perkaranya," tuturnya.

Sejauh ini persoalan hukum yang menjerat warga kurang mampu di DIY masih seputar penyakit masyarakat. Trisno mengungkapkan jika masalah perjudian masih mendominasi kasus lain seperti penganiayaan, pemukulan, narkoba, dan lain-lain. (kur)